P-ISSN 2656-4262 | E-ISSN 2807-6109
JURNAL ILMIAH NIZAMIA
Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama
Volume 05, No. 2, April 2023

PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah)

DEMOCRACY PROCESS OF INDONESIA IN THE NEW PERIOD (1966-1998) (Studies on History Subjects)

Hj. Marjum
marjummale@gmail.com
Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia
MAN 2 Polewali Mandar
Jl. Raya Majene No. 175 Desa Bonne- bonne, Kec. Mapilli., Sulawesi Barat

Diterima : 06 April 2023
Direvisi : 11 April 2023
Disetujui : 12 April 2023

ABSTRACT

This study aims to explain society's condition during the New Order in various fields. The results of the study show that; Based on the explanation in the discussion above, it can be concluded that; When the New Order took power and controlled the government, there was a desire to maintain power or the status quo. This resulted in a negative entry, which was subsequently removed from the original New Order ruling. In the end, many types of deviations were committed, deviations from Pancasila values and the provisions of the 1945 Constitution were mainly carried out by the New Order government. Many injustices occurred during the New Order government; For example, the power of the judiciary is contained in Article 24 of the 1945 Constitution, where the judicial power has powers that are independent and separate from the government (executive power). After the student reform movement was born, legal issues also became part of its demands. Society wants reform in the field of justice to bring legal issues to their true place or position. The implementation of legal reform must be accelerated because the prerequisite is being ready to face the era of economic order and globalization.

Keywords; Democracy, the new Period

ABSTRAKSI

Tujuan dari kajian ini adalah, untuk menjelaskan keadaan masyarakat selama Orde Baru dalam berbagai bidang. Hasil kajian menunjukkan bahwa; Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan dan menguasai pemerintahan, muncul keinginan untuk tetap mempertahankan kekuasaan atau status quo. Hal ini menghasilkan entri negatif, yang selanjutnya dihapus dari keputusan awal Orde Baru. Akhirnya banyak jenis penyelewengan yang dilakukan, penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 terutama dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Banyak ketidakadilan terjadi selama pemerintahan Orde Baru; Misalnya, kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945, dimana kekuasaan kehakiman mempunyai kekuasaan yang mandiri dan terpisah dari pemerintah (kekuasaan eksekutif). Setelah gerakan reformasi mahasiswa lahir, persoalan hukum juga menjadi bagian dari tuntutannya. Masyarakat menginginkan reformasi di bidang peradilan untuk membawa masalah hukum ke tempat atau kedudukannya yang sebenarnya. Pelaksanaan reformasi hukum harus dipercepat, karena prasyaratnya adalah siap menghadapi era tatanan ekonomi dan globalisasi.

Kata Kunci; Demokrasi di Indonesia, Masa Orde Baru

PENDAHULUAN

Orde baru menggantikan orde lama, yang mengacu pada pemerintahan Sukarno sejak Indonesia merdeka.

Begitu banyak "pembatasan" pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, oleh karena itu lebih dikenal dengan demokrasi perwakilan, sedangkan pada era reformasi dikenal "kebebasan", maka disebut demokrasi langsung.

Orde Baru merupakan sebuah era yang merupakan kelanjutan dari Orde Lama yang telah berakhir. Orde Baru juga merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno (Orde Lama) dengan masa Soeharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965, (I. Amal, 1998).

Salah satu penyebab berakhirnya masa pemerintahan orde lama adalah meletusnya Gerakan 30 September/PKI. Gerakan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat luas dan mengutuk pembunuhan besar-besaran yang telah dilancarkan PKI. Selain itu, ketidaktegasan pemerintahan Soekarno dalam menangani partai berlandas ideologi komunis tersebut, menyebabkan merosotnya legitimasi kekuasaan pemerintah. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dan kemudian dikukuhkan dalam TAP MPRS No.XXXIII/1967, kekuasaan akhirnya beralih dari tangan pemerintah Soekarno sebagai penguasa Orde Lama ke pemerintahan Soeharto sebagai pemegang rezim Orde Baru, (T. Abdullah, 2003).

Orde Baru kemudian menandai sebuah era pemerintahan baru di Indonesia pasca pemberontakan PKI tahun 1965, (Alfian, 1990). Orde ini memiliki tekad dan komitmen yang sangat kuat untuk menegakkan pemerintahan RI atas dasar Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan pada kajian ini adalah; *Bagaimana keadaan masyarakat selama Orde Baru dalam berbagai bidang?* Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah, untuk menjelaskan keadaan masyarakat selama Orde Baru dalam berbagai bidang.

KAJIAN TEORITIK

A. Lahirnya Orde Baru

Lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Orde Baru lahir sebagai rezim yang ingin mengoreksi penyelewengan tehadap Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 selama masa Orde Lama. Koreksi ini penting, karena segala bentuk penyelewengan tersebut telah menyebabkan kemunduran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negara yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI, (D. Aritonang , 1998).

Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar, (A Daliman, 2012).

Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut;

1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui TAP MPRS No.XXXIII/1967, (AePriyono & Usman Hamid, 2014).

   Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah awal seperti berikut;

   a. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya
   b. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam G 30 S/PKI
   c. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis, (A. H. Nasution, 1979).

   Adapun langkah penting yang diambil pemerintah Orde Baru antara lain:

   1) Membubarkan PKI dan menghancurkan PKI dan ormas-ormasnya;

2) Konsolidasi pemerintah dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945;
3) Menghapus dualisme dalam kepemimpinan nasional;
4) Mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan;
5) Menyelenggarakan pemilihan umum;
6) Menyederhanakan partai politik;
7) Melaksanakan sidang umum MPR 1973;
8) Melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, (Batara R. Hutagalung, 2009).

B. Keadaan Masyarakat Selama Masa Orde Baru

Seperti yang telah kita ketahui, tujuan terbentuknya Negara Indonesia adalah "Memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia". Dalam pelaksanaannya, tugas Negara ini dapat diselewengkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa demi kepentingan kekuasaannya, (J. Asshidiqie, 2010).

Orde Lama telah gagal melaksanakan cita-cita negara yang dimaksud. Keadaan masyarakat Orde Lama ditandai dengan penyelewengan terhadap dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimana dengan keadaan masyarakat pada masa Orde Baru? Apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya? Berikut potret kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru di berbagai bidang.

1. Ideologi

   Takut akan kembalinya Ideologi komunis di Indonesia, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

   Namun, yang dilakukan oleh Orde Baru adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tertutup, meskipun Orde Baru sering mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila hanya ditafsirkan dari satu versi saja, yakni pemerintah. Pemerintah Orde Baru memilki BP-7 yang bertugas memahami Pancasila secara "benar", menafsirkan secara benar dan menyampaikan tafsiran tersebut kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat harus pernah mengikuti penataran P4 dan memperoleh sertifikat sebagai syarat dalam mencari pekerjaan, melanjutkan studi, kenaikan pangkat dan golongan, dan sebagainya, (M. Budiardjo, 1981).

   Tidak hanya itu, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya ideologi yang seolah-olah ideologi lain bisa dimasukkan ke dalam Pancasila. Organisasi apapun harus berasaskan Pancasila, jika tidak akan dijebloskan ke penjara. Selama Orde Baru juga terjadi indoktrinasi Pancasila secara intens yang bersifat berlebihan dan membosankan. Meskipun demikian masyarakat tidak berani untuk menentang, karena takut dianggap tidak Pancasilais dan dapat ditangkap, (A. D. Busroh, 2010).

2. Politik

   Melihat situasi politik yang kian memanas, DPR-GR berpendapat perlu dilakukan penyelesaian politik secara konstitusional. Atas anjuran berbagai pihak, presiden Soekarno memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang dilakukan sebagai upaya mengakhiri konflik politik dalam negeri, (Detikcom, 2008).

   Usaha yang dilakukan untuk menata kehidupan politik antara lain;

   a. Pembentukan Kabinet Pembangunan

      Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma. Kabinet AMPERA yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA disebut Catur Karya Kabinet AMPERA, (Rosihan Anwar, 2006).

      Setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, (MD, Moh. Mahfud, 1993).

   b. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

      Setelah diadakan pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas

persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, antara lain;

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam seperti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam);
2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis);
3) Golongan Karya (Golkar), (B. Djamily, 1994).

c. Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap pertangung-jawaban, Rancangan Undang-Undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan, (Effendy dkk., 2012).

d. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969 dan Kembali menjadi anggota PBB. Penentuan Argumen Rakyat (Pepera) adalah referendum yang disediakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk memilihkan status kawasan anggota barat Pulau Papua, selang milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilihkan pilihan persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi, (Muhammmad Hikam, 1999).
Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966, (Cindy Adams, 2018).

e. Pendirian ASEAN (Association of South-East Asian Nations).
Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Masih di bidang politik, pemerintah Orde Baru sangat mengontrol kebebasan berpendapat meskipun dalam UUD menjamin hal ini. Mahasiswa yang sangat aktif berdemonstrasi kini tidak bebas lagi. Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sejak tahun 1978, membungkam suara mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian pula dengan kebebasan pers yang merupakan salah satu faktor penting dalam demokrasi. Pers yang terlalu memberitakan masalah sensitif atau masalah yang dianggap membahayakan keberlangsungan Orde Baru akan dibredel (dicabut izinnya), (Bambang Widjanarko, 1998).

3. Sosial

Pemerintah Orde Baru memperluas kekuasaan mereka atas kehidupan sosial masyarakat melalui tentara. TNI memiliki struktur organisasi yang menempatkan

mereka sampai ke desa-desa. Dengan struktur ini, TNI mengawasi dan mempengaruhi seluruh kehidupan sosial warga negaranya. Tidak mengherankan TNI bisa menyusup ke dalam kelompok-kelompok sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak membahayakan negara. Sementara karena masyarakat semakin lama semakin tidak memiliki kesadaran politik, maka hubungan sosial antar sesama warga bersifat steril terhadap politik, (Atmadji Sumarkidjo, 2006).

4. Kebudayaan

Pemerintah Orde Baru mendefinisikan kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, kebudayaan daerah yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus atau dilarang. Pemerintah juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya mengahasilkan karya seni. Karya seni yang membahayakan Pancasila dan UUD akan dilarang. Demikian pula dengan pementasan drama atau teater. Semuanya harus ada izin tertulis dari aparat keamanan. Selain itu isi pementasan atau isi puisi harus dikontrol.

5. Ekonomi

Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Dengan demokrasi Terpimpin, pemerintah menempuh cara;

a. Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
b. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan. Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada TapMPRS tersebut adalah sebagai berikut:
    1) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan;
    2) Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian;
    3) Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara;
        a) Mengadakan operasi pajak;
        b) Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang;
        c) Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara;
        d) Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. Seluruh perencanaan dan pembangunan ekonomi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Rakyat hanya menjadi objek atau sasaran pembangunan. Untuk memajukan perekonomian nasional, pemerintah terus memajukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde baru dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam daricara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau ditempuh dengan cara:
            1) Intensifikasi Pertanian

            Intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi:
            a) Pemilihan bibit unggul;
            b) Pengolahan tanah yang baik;
            c) Pemupukan;
            d) Irigasi;
            e) Pemberantasan hama

2) Ekstensifikasi Pertanian
Ekstensifikasi pertanian, yaitu Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru.
3) Diversifikasi Pertanian
Usaha penganeka-ragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari.
4) Rehabilitasi Pertanian
Merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.

6. Pertahanan dan Keamanan

Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. Peran dan kedudukan ABRI semacam tidak hanya mengukuhkan kekuatan pengaruh ABRI dalam penyelenggaraan Negara, tetapi juga mengamankan kekuasaan Orde Baru itu sendiri. Tentara selama masa Orde Baru adalah sebagai alat kekuasaan bagi pemerintah Orde Baru.

7. Agama

Selama masa Orde Baru, hanya 5 agama saja yang diperbolehkan hidup dan berkembang di kalangan masyarakat sedangkan agama-agama lain dilarang. Orang yang tidak beragama pun dilarang, jadi semua orang harus beragama, tetapi agamanya harus salah satu dari kelima agama yang diperbolehkan. Pemerintah juga mengawasi praktik-praktik keagamaan setiap agama. Praktik keagamaan yang membahayakan keamanan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan ditindak dengan keras.

C. Jatuhnya Orde Baru

Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidak adilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat.

Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program ”Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi

reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi, (Agung Mahar, 2015).

Selain itu juga, membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UUAnti monopoli, dan UU Anti korupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi, (Habibie, Bacharuddin Jusuf, 2006).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan dan menguasai pemerintahan, muncul keinginan untuk tetap mempertahankan kekuasaan atau status quo. Hal ini menghasilkan entri negatif, yang selanjutnya dihapus dari keputusan awal Orde Baru. Akhirnya banyak jenis penyelewengan yang dilakukan, penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 terutama dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Banyak ketidakadilan terjadi selama pemerintahan Orde Baru; Misalnya, kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945, dimana kekuasaan kehakiman mempunyai kekuasaan yang mandiri dan terpisah dari pemerintah (kekuasaan eksekutif). Setelah gerakan reformasi mahasiswa lahir, persoalan hukum juga menjadi bagian dari tuntutannya. Masyarakat menginginkan reformasi di bidang peradilan untuk membawa masalah hukum ke tempat atau kedudukannya yang sebenarnya. Pelaksanaan reformasi hukum harus dipercepat, karena prasyaratnya adalah siap menghadapi era tatanan ekonomi dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A Daliman. (2012). Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

A. D. Busroh. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

A. H. Nasution. (1979). Perang Gerilya Semesta II: Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung: Angkasa Bandung Indonesia.

AePriyono & Usman Hamid. (2014). Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Agung Mahar. (2015). Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999. Jurnal ilmu pemerintahan. Volume 2 No 2. Oktober 2015, 28.

Alfian. (1990). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Atmadji Sumarkidjo. (2006). Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

B. Djamily. (1994). Golkar Era Harmoko : demokrasi dan hak asasi manusia. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.

Bambang Widjanarko. (1998). Sewindu Dekat Bung Karno. Jakarta: GPU.

Batara R. Hutagalung. (2009). Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: LkiS.

Cindy Adams. (2018). Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Jakarta: Yayasan Bung Karno - PT Media Pressindo.

D. Aritonang . (1998). Runtuhnya Rezim dari Pada Soeharto. Bandung: Pustaka Hidayah.

Detikcom. (2008). Hari-hari Terakhir Jejak Soeharto setelah Lengser 1998- 2008. Jakarta: Mediakita.

Effendy dkk. (2012). Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar. Jakarta: Grafindo.

Habibie, Bacharuddin Jusuf. (2006). Detik-detik yang Menentukan. Jakarta: THC Mandiri.

I. Amal. (1998). Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana .

J. Asshidiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Budiardjo. (1981). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

MD, Moh. Mahfud. (1993). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Muhammmad Hikam. (1999). Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Rosihan Anwar. (2006). Sukarno – Tentara – PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965. Jakarta: YOI.

T. Abdullah. (2003). Krisis Masa Kini dan Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.